



Bupati Optimalkan Penyerapan Anggaran

Sayangnya Serapan Anggaran Dinas Pendidikan Masih Minim

SUNGAI RAYA, RK. Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH menegaskan, APBD perubahan tahun anggaran 2015, aspek kebijakannya tetap mengacu pada nota kesepatakn mengenai kebijakan umum APBD dan nota kesepatakn prioritas plafon anggaran yang telah disetujui pada APBD murni lalu.

"Perubahan anggaran ini, bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati. Namun lebih merupakan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut," kata Kusnan Ali, kemant.

Perubahan anggaran yang diusulkan

tersebut, hanya berupa penambahan atau penyusunan terhadap rencana penerimaan daerah, penyesuaian atau penambahan alokasi dana pada kegiatan tertentu, yang sebelumnya tidak mampu didukung optimal. Kemudian mengasasi penganggaran beberapa kegiatan dan program baru yang tidak dapat diakomodasi pada anggaran murni tahun 2015, karena keterbatasan pembiayaan.

Pada APBD perubahan ini, pendapatan daerah mengalami kenaikan, terutama pendapatan yang berasal dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Selain itu, adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan pada Dinas Pertanian dan Peternakan, juga ikut menambah APBD perubahan tahun 2015. "Perumulkannya sudah jelas dan tidak mungkin dialokasikan di luar dari yang telah ditetapkan," ucap Kusnan Ali.

Karenanya di dalam APBD perubahan, dengan kondisi keuangan yang sangat teratas, maka diprioritaskan pada pegeseran anggaran yang telah tersedia, dan penambahan kegiatan yang benar-benar tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

"Bagi program dan kegiatan yang belum dapat didukung dalam perubahan ini, akan kami usulkan kembali untuk dialokasikan pada APBD murni tahun 2016," jelas Rusman Ali.

Minim Serapan Anggaran

Dibertakan sebelumnya, masih ditemukan minimnya penyerapan anggaran di Saman Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahannya, mengancam Pemkab Kubu Raya untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Minimnya penyerapan anggaran ditemukan di Dinas Pendidikan Kubu Raya. Serapan anggaran yang dilakukan hanya berkisar 30 persen. Sementara itu, buku tahun anggaran tinggal tiga bulan lagi. Selain itu, ditemukan tumpang-tindih perusahaan kontraksi yang akan mengerjakan proyek fisik maupun pengadaan di Dinas Pendidikan. Kecerobohan inilah yang diduga menjadi biang kerok minimnya penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kubu Raya.

"Kami minta Bupati Kubu Raya memantau hingga pengawasan kinerja kepala SKPD tersebut. SKPD seperti Dinas Pendidikan ini harus diawasi dan dievaluasi kinerjanya. Kami berharap meminta evaluasi, karena salah satu tugas kami menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah," tegas Suprpto, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, kemant.

Minimnya penyerapan anggaran, secara tak langsung akan merugikan masyarakat. Sejak awal pemerintah telah menetapkan target pembangunan menggunakan anggaran yang telah disediakan. Namun proses pembangunan tak kunjung dilakukan Dinas Pendidikan Kubu Raya.

**Laporan: Syamsul Arifin
Editor: Hamka Saptono**



Rusman Ali